

**PROSPEK DAN TANTANGAN PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA DI DESA  
AIR HITAM KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN DALAM  
MENGHADAPI SERTIFIKASI ISPO**

**PROSPECTS AND CHALLENGES OF INDEPENDENT OIL PALM  
SMALLHOLDERS IN AIR HITAM VILLAGE UKUI DISTRICT PELALAWAN  
REGENCY TOWARDS ISPO CERTIFICATION**

**Dewi Yosefin Tumiar Sibarani<sup>1</sup>, Sakti Hutabarat<sup>2</sup>, Novia Dewi<sup>2</sup>**  
**Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture University of Riau**  
**Jl. Binawidya 30, Pekanbaru 28291**  
***Wie\_yooze@yahoo.com***

**ABSTRAK**

Increasing demand for palm oil and palm oil derivative products has triggered demand for oil palm fruit. This phenomena has been responded by Indonesian oil palm growers by increasing oil palm production through land expansion. Land expansion has been claimed as the source of deforestation, land degradation, biodiversity loss, greenhouse gas emission, and land conflicts. The Indonesian Sustainable Palm Oil has been established to promote sustainable oil palm production. However, the implementation of the certification program face various problem, especially at the smallholder levels. The objective of this study is to analyze the performance of independent oil palm smallholders, to assess the application of good agricultural practices in relation with the ISPO standards and to analyses prospects and challenges toward certification ISPO. The study use agribusiness income analyses, scaling method to measure the smallholders practices based on the ISPO standard and descriptive method to analyze prospects and challenges faced by smallholders to obtain ISPO certification. The result shows that the oil palm smallholder profits on average are above the regional wage standard. However, the smallholders compliance to the ISPO standards is only 43.5%. Certification ISPO would promote better acces to independent smallholder in market acces, financial acces and endorse sustainable production of oil palm. However, independent oil palm smallholders face various challenges to obtain certificate of ISPO. This figure shows that there will be lots of effort to be done to get the ISPO certification.

Keywords : Oil palm, ISPO certification, smallholders' performance, independent smallholders

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Agribisnis FAPERTA UR

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Agribisnis FAPERTA UR

## PENDAHULUAN

Perkembangan kelapa sawit di Indonesia melaju sangat cepat. Sebelum kemerdekaan komoditi kelapa sawit hanya dapat dikelola oleh perkebunan besar asing milik perusahaan Belanda. Setelah kemerdekaan seluruh perkebunan kelapa sawit dinasionalisasi dan dikelola oleh perkebunan besar negara. Tahun 1970an, perusahaan swasta nasional mulai berinvestasi mengelola perkebunan besar kelapa sawit. Mencermati semakin tingginya permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit dan kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam pendayagunaan kelapa sawit, pemerintah lalu menggalakkan program pengembangan perkebunan untuk petani (Badrun 2010).

Program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau Nucleus Estate Smallholders (NES) mengembangkan perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan antara perusahaan inti dan plasma. Program ini pada mulanya dikembangkan di lima provinsi kemudian tersebar di 22 provinsi di Indonesia (Manggabarani 2009). Setelah Proyek PIR/NES, pemerintah terus mengembang pola-pola baru pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat seperti PIR-Trans (1986), PIR-KKPA (1996) dan Pola Kemitraan untuk petani swadaya pada tahun 2000an.

Perkebunan kelapa sawit memberikan berbagai manfaat positif bagi perekonomian Indonesia. Kelapa sawit menjadi penyumbang devisa negara melalui ekspor minyak kelapa sawit (CPO), membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (sebagai petani, buruh pabrik, karyawan perusahaan, pedagang, dll), mengembangkan perekonomian desa, dan mengentaskan kemiskinan. Perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu *leading sector* dalam pembangunan ekonomi di Indonesia..

Namun demikian, perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif dalam pengembangannya. Perkebunan kelapa sawit Indonesia

diklaim tidak ramah lingkungan dan tidak mengarah pada pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Kebakaran hutan dan lahan dalam pembukaan maupun perluasan lahan mengakibatkan banyak ekosistem hutan yang rusak. Rusaknya ekosistem ini berimbas pada terganggunya rantai makanan dan hilangnya spesies langka. Pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak jarang menimbulkan konflik lahan dan konflik sosial yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Beberapa kalangan prihatin terhadap perkembangan perkebunan kelapa sawit dan melakukan berbagai upaya agar pembangunan kelapa sawit dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Pada tahun 2004 beberapa stakeholder internasional menginisiasi didirikannya *Rountable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO mendorong produksi dan penggunaan produk-produk kelapa sawit secara lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan sosial.

Tahun 2007 Indonesia menginisiasi produksi kelapa sawit berkelanjutan yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.19/OT.140/3/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). ISPO diharapkan dapat mengatasi dampak negatif maupun isu-isu negatif mengenai perkembangan kelapa sawit Indonesia. ISPO bersifat *mandatory* atau merupakan suatu kewajiban bagi setiap usaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Sertifikasi ISPO mulai diterapkan di Indonesia setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman ISPO. Pelaksanaan Sertifikasi ISPO pada awalnya diwajibkan bagi perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Indonesia. Seluruh perusahaan besar kelapa sawit di Indonesia harus telah memiliki sertifikasi

ISPO paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Sertifikasi ISPO untuk perkebunan rakyat telah mulai dirumuskan sejak tahun 2012 dan finalisasinya diperkirakan selesai bulan Desember 2014. Pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perkebunan rakyat dimulai direncanakan dimulai pada awal 2015 dengan membuat beberapa pilot project di Kabupaten Pelalawan Riau. Pilot project sertifikasi ISPO ini mendapatkan bantuan dari lembaga *United Nation Development Project* (UNDP).

Sertifikasi ISPO menghendaki dipenuhi dan dipatuhinya prinsip dan kriteria ISPO. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon petani dan kelompok taninya yang ingin mendapatkan sertifikasi melalui proses yang ketat. Adanya sertifikasi ISPO diharapkan akan memberikan manfaat baik kepada petani, masyarakat dan lingkungan hidup. Namun, kondisi perkebunan rakyat dengan berbagai keterbatasannya diduga akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam proses mendapatkan sertifikasi ISPO. Isu-isu inilah yang menjadi permasalahan dalam studi ini, yaitu bagaimana keragaan usahatani kelapa sawit rakyat di Desa Air Hitam pada saat ini? Sejauh mana tingkat penerapan praktek-praktek terbaik dibandingkan standar ISPO telah dilakukan oleh petani kelapa sawit rakyat? Bagaimana prospek dan tantangan petani kelapa sawit swadaya dalam menghadapi sertifikasi ISPO? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis keragaan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Air Hitam, (2) Mengukur tingkat penerapan praktek-praktek terbaik dibandingkan dengan standar ISPO, dan Menganalisis prospek dan tantangan petani kelapa sawit swadaya dalam menghadapi sertifikasi ISPO.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten

Pelalawan, Provinsi Riau. Desa ini dipilih karena desa ini merupakan salah satu calon lokasi pelaksanaan *pilot project* sertifikasi ISPO petani kelapa sawit swadaya pertama oleh pihak UNDP. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November dengan Desember 2014.

### **Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani kelapa sawit swadaya berdasarkan kuesioner yang telah tersedia dengan pengamatan langsung di lapangan. Data primer yang diperlukan berupa identitas petani sampel, aspek budidaya, produksi dan produktivitas, pendapatan (pendapatan usahatani kelapa sawit, pendapatan usahatani selain kelapa sawit dan pendapatan non-pertanian) dan penerapan untuk setiap Prinsip dan Kriteria ISPO yang dilakukan petani. Data sekunder yang diperlukan diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD). Data sekunder yang dibutuhkan antara lain profil desa yang meliputi keadaan desa, jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, prasarana dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.

### **Metode Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah petani kelapa sawit swadaya yang berada di Desa Air Hitam. Besarnya sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan studi yang dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif dan tidak menggunakan statistik inferensia. Selain itu, besar sampel kebutuhan analisis penelitian mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keseragaman karakteristik dari petani kelapa sawit di wilayah penelitian. Dari populasi petani kelapa sawit swadaya diambil sampel sebanyak 33 orang dengan menggunakan Teknik Snow ball. Teknik ini digunakan karena

tidak diperoleh informasi yang akurat tentang penduduk yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.

### Analisis Data

Keragaan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan dengan menganalisis praktek budidaya kelapa sawit yang diterapkan pada saat penelitian dan dilanjutkan dengan analisis usaha perkebunan kelapa sawit. Keragaan budidaya yang diamati meliputi jenis bibit (varietas), pemeliharaan (pembersihan kapling, pembersihan piringan, pemangkasan, dan pemupukan), dan pemanenan. Keragaan usahatani kelapa sawit dilakukan dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, harga jual dan pendapatan usahatani serta pendapatan rumah tangga.

### Analisis Usaha Keragaan Perkebunan Kelapa Sawit

Analisis usahatani perkebunan kelapa sawit akan menghitung jumlah input yang digunakan, biaya-biaya pengadaan input, berapa banyak produksi yang mampu dihasilkan petani dan pendapatan usahatani yang diperoleh oleh petani. Perhitungan analisis usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan menghitung biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, produksi, harga, pendapatan kotor, dan pendapatan bersih usahatani. Analisis usahatani dilakukan dengan menggunakan rumus (Soekartawi 1995; Shadbolt and Martin 2005):

$$TR = Q \times P \quad (1)$$

dimana :

TR= Total penerimaan (Rp)

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan (Kg)

P = Price (Rp)

$$\Pi = R - VC - FC \quad (2)$$

dimana :

$\Pi$  = Profit/keuntungan (Rp)

R = Revenue/penerimaan (Rp)

VC = Variabel cost / Biaya variabel (Rp)

FC = Fixed cost / Biaya tetap (Rp)

$$I_{farm} = \Pi - \text{Biaya Faktor} \quad (3)$$

dimana :

$I_{farm}$  = pendapatan dari kelapa sawit (Rp)

Biaya faktor = biaya bunga, biaya sewa dan pajak (Rp)

Apabila terdapat pendapatan non-pertanian dan pendapatan non-kelapa sawit, maka total pendapatan petani dirumuskan sebagai berikut (Widodo 1990; Finger and Peerlings 2012) :

$$I_{hhfarm} = I_{farm} + I_{nonfarm} \quad (4)$$

dimana :

$I_{hhfarm}$  =total pendapatan rumah tangga petani(Rp).

$I_{farm}$  = pendapatan dari kelapa sawit(Rp)

$I_{nonfarm}$  =pendapatan non-kelapa sawit/pendapatan non-pertanian (Rp)

### 3.4.2. Tingkat Penerapan Standar ISPO

Analisis penerapan praktek-praktek budidaya terbaik (*Good Agriculture Practices/GAP*) dan praktek-praktek terbaik pengelolaan usaha perkebunan (*Best Management Practices*) sesuai dengan standar ISPO berdasarkan dokumen Ketentuan Pengelolaan ISPO Petani Swadaya Revisi 2 Agustus 2014 di Hotel Salak, Bogor. Analisis dilakukan dengan mengamati praktek-praktek yang diterapkan petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam dilakukan dengan menggunakan catatan budidaya petani dan kuesioner Prinsip & Kriteria ISPO.

Penerapan standar ISPO petani kelapa sawit swadaya dikelompokkan menjadi 5 yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Pertanyaan yang diajukan akan diberi skor pertanyaan dan jawaban dibuat dalam kategori dan skor. Jumlah responden yang diambil sebanyak (33) orang, jumlah pertanyaan sebanyak (20) dengan skor tertinggi (5) dan skor terendah (1).

Tingkat penerapan praktek-praktek terbaik yang dilakukan petani dalam

usahatani kelapa sawit di Desa Air Hitam dibandingkan dengan standar P&C ISPO adalah sebagai berikut:

**a. Setiap kriteria tingkat penerapan diukur sebagai berikut:**

Skor tertinggi = h = 5  
 Skor terendah = l = 1  
 Skala interval =  

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{(5-1)}{5} - 0,01 = 0,79 \quad (5)$$

Tabel 3.1. Kategori tingkat penerapan untuk setiap kriteria

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	4,20 – 5,00
2	Baik	3,40 – 4,19
3	Cukup Baik	2,60 – 3,39
4	Kurang Baik	1,80 – 2,56
5	Tidak baik	1,00 – 1,79

Skor rata-rata sampel untuk setiap kriteria dihitung dengan menjumlahkan skor setiap sampel untuk kriteria tertentu dan dibagi dengan jumlah sampel. Rumus rata-rata sampel untuk kriteria ke-k ( $X_k$ ) digunakan rumus:

$$\bar{X}_k = \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \quad (6)$$

dimana

$\bar{X}_k$  = skor rata-rata sampel untuk kriteria ke-k

$X_{ks}$  = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ke-k

n = jumlah sampel

**b. Kriteria dalam setiap prinsip tingkat penerapan diukur sebagai berikut:**

Skor tertinggi = p x h  
 Skor terendah = p x l  
 Skala interval =  

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{p(h-l)}{5} - 0,01 \quad (7)$$

**Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Satu**

Skor tertinggi = 2 x 5 = 10  
 Skor terendah = 2 x 1 = 2

Skala interval =  

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{2(5-1)}{5} - 0,01 = 1,59 \quad (8)$$

Tabel 3.2. Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Satu

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	8,4-10
2	Baik	6,8-8,3,9
3	Cukup Baik	5,2-6,7,9
4	Kurang Baik	3,6-5,1,9
5	Tidak baik	2-3,5,9

**Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Dua**

Skor tertinggi = 14 x 5 = 70

Skor terendah = 14 x 1 = 4

Skala interval =  

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{14(5-1)}{5} - 0,01 = 11,19 \quad (9)$$

Tabel 3.3. Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Dua

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	60,6-70
2	Baik	48,95-60,95
3	Cukup Baik	37,3-48,94
4	Kurang Baik	25,65-37,29
5	Tidak baik	14-25,64

**Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Dua Bagian Pertama**

Skor tertinggi = 4 x 5 = 20

Skor terendah = 4 x 1 = 4

Skala interval =  

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{4(5-1)}{5} - 0,01 = 3,19 \quad (10)$$

Tabel 3.4. Kategori tingkat penerapan

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	16,8-20
2	Baik	13,6-16,7,9
3	Cukup Baik	10,4-13,5,9
4	Kurang Baik	7,2-10,3,9
5	Tidak baik	4-7,1,9

**Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Dua Bagian Kedua**

Skor tertinggi =  $10 \times 5 = 50$

Skor terendah =  $10 \times 1 = 10$

Skala interval =

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{10(5-1)}{5} - 0,01 = 7,99 \quad (11)$$

Tabel 3.5. Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Dua Bagian 2

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	42-50
2	Baik	34-41,99
3	Cukup Baik	26-33,99
4	Kurang Baik	18-25,99
5	Tidak baik	10-17,99

**Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Tiga**

Skor tertinggi =  $3 \times 5 = 15$

Skor terendah =  $3 \times 1 = 3$

Skala interval =

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{3(5-1)}{5} - 0,01 = 2,79 \quad (12)$$

Tabel 3.6. Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Tiga

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	14,2-15
2	Baik	11,4-14,19
3	Cukup Baik	8,6-11,39
4	Kurang Baik	5,8-8,59
5	Tidak baik	3-5,79

**Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Empat**

Skor tertinggi =  $1 \times 5 = 5$

Skor terendah =  $1 \times 1 = 1$

Skala interval =

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{1(5-1)}{5} - 0,01 = 0,79 \quad (13)$$

Tabel 3.7. Kategori tingkat penerapan untuk Prinsip Empat

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	4,2-5,00
2	Baik	3,4-4,19
3	Cukup Baik	2,6-3,39

4	Kurang Baik	1,8-2,59
5	Tidak baik	1,00-1,79

Skor rata-rata sampel untuk setiap prinsip diukur dengan menjumlahkan skor setiap sampel untuk kriteria dalam prinsip tertentu dan dibagi dengan jumlah sampel. Rumus rata-rata sampel untuk suatu prinsip ke-p ( $X_p$ ) digunakan rumus:

$$\bar{X}_p = \sum_{k=1}^r \left[ \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right] \quad (14)$$

dimana

$\bar{X}_p$  = skor rata-rata sampel untuk kriteria dalam prinsip ke-p

$X_{ks}$  = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ( $k_{1...r}$ ) dalam prinsip ke-p

r = jumlah kriteria dalam suatu prinsip

n = jumlah sampel

**c. Tingkat penerapan untuk keseluruhan kriteria (20 pertanyaan) diukur sebagai berikut:**

Skor tertinggi = h =  $20 \times 5 = 100$

Skor terendah = l =  $20 \times 1 = 20$

Skala interval =

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - 0,01 = \frac{(100-20)}{5} - 0,01 = 15,99 \quad (15)$$

Tabel 3.8. Kategori tingkat penerapan untuk seluruh kriteria

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	82,00 – 100,00
2	Baik	66,00 – 81,99
3	Cukup Baik	50,00 – 65,99
4	Kurang Baik	34,00 – 49,99
5	Tidak baik	20,00 – 35,99

Tingkat penerapan standar ISPO dinilai berdasarkan pengukuran terhadap seluruh kriteria. Skor rata-rata sampel untuk keseluruhan kriteria adalah penjumlahan dari skor rata-rata sampel untuk setiap kriteria.

$$\bar{X} = \sum_{k=1}^r \left[ \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right] \quad (16)$$

dimana

$\bar{X}$  = skor rata-rata sampel untuk seluruh kriteria (k)

$X_{ks}$  = skor setiap sampel (s) untuk seluruh kriteria (k)

r = jumlah keseluruhan kriteria

n = jumlah sampel

Tabel 3.9. Matriks pengukuran tingkat penerapan praktek-praktek terbaik

No. Sampel	P <sub>1</sub>		P <sub>2</sub>	..	P <sub>p</sub>	Total
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>34</sub>	X <sub>k</sub>	
1						TS <sub>1</sub>
2						TS <sub>2</sub>
....						....
s						TS <sub>70</sub>
Total	$\sum_{s=1}^n X_{ks}$					$\Sigma TS$
Rata-rata Kriteria	$\frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n}$					$\sum_{k=1}^r \left[ \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right]$
Rata-rata Prinsip	$\sum_{k=1}^r \left[ \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right]$					

Rata-rata sampel untuk setiap kriteria

$$= \bar{X}_k = \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n}$$

Rata-rata sampel untuk setiap prinsip

$$= \bar{X}_p = \sum_{k=1}^r \left[ \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right]$$

Rata-rata sampel untuk seluruh kriteria =

$$\bar{X} = \sum_{k=1}^r \left[ \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right]$$

### 3.4.3 Analisis Prospek dan Tantangan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Menghadapi Sertifikasi ISPO

Prospek dan tantangan yang mempengaruhi petani dalam menghadapi sertifikasi ISPO dianalisis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan suatu fenomena, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Data yang digunakan merupakan data keragaan usahatani dan penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO.

Prospek petani perkebunan kelapa sawit swadaya dalam menghadapi sertifikasi ISPO adalah gambaran tentang kemungkinan atau kesempatan petani kelapa sawit swadaya dalam mendapatkan

sertifikat RSPO. Prospek dianalisis dengan mempertimbangkan keadaan sekarang dari perkebunan kelapa sawit rakyat baik internal maupun eksternal.

Tantangan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan dan mencapai sertifikasi RSPO dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai hambatan baik internal maupun eksternal yang mungkin dihadapi dalam mendapatkan sertifikasi ISPO

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keragaan Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya

Pola usahatani kelapa sawit yang dilakukan petani di Desa Air Hitam adalah pola swadaya. Petani melakukan budidaya kelapa sawit berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Petani pada umumnya tidak pernah mengikuti pelatihan dan penyuluhan mengenai budidaya perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat disebabkan karena petani masih belum membentuk kelompok tani atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani kelapa sawit swadaya.

Luas lahan yang dimiliki petani kelapa sawit swadaya beragam, rata-rata luas lahan petani kelapa sawit swadaya adalah 2,57 ha. Petani yang memiliki luas lahan 1-2 ha sebanyak 13 orang (39,3%), kemudian petani yang memiliki luas lahan 2,1-3 ha sebanyak 13 orang (39,3%). Petani yang memiliki luas lahan 3,1-4 ha sekitar 4 orang (12,1%) dan luas lahan 4,1-5 ha sekitar 3 orang (9%).

Legalitas lahan yang digunakan petani kelapa sawit swadaya terdiri dari surat tanah adat, surat jual beli, SKT, SKGR dan SHM. Legalitas lahan terbanyak yang dimiliki petani adalah SKT (36,4%) dan SHM (33,3%). Petani pada umumnya sadar akan kebutuhan legalitas lahan dan perbedaan setiap legalitas lahan yang mereka gunakan. Sebagian dari petani yang memiliki SKT

sedang dalam proses pengurusan SHM sebagai legalitas kepemilikan lahan.

Lahan yang digunakan petani sebelum ditanami kelapa sawit merupakan bekas lahan pertanaman karet, padi sawah, semak belukar, hutan tanaman dan hutan alam. Pada umumnya perkebunan kelapa sawit petani swadaya adalah bekas semak belukar yang dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Umur rata-rata tanaman kelapa sawit yang dimiliki petani adalah 8,8 tahun. Petani umumnya mulai menanam kelapa sawit sejak tahun 2005, yaitu ketika harga buah sawit menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Jarak tanam yang digunakan dalam budidaya kebun kelapa sawit adalah 9,5 m x 9,5 m x 9,5 m dan jarak antar baris 8,23 m. Dengan jarak tanam yang digunakan petani, akan diperoleh rata-rata jumlah tanaman adalah 128,97 ha. Penggunaan jarak tanam tertentu biasanya mengacu pada jarak tanam kelapa sawit pada perkebunan plasma yang berlokasi di sekitar Desa Air Hitam.

Pada perkebunan kelapa sawit rakyat juga terdapat tanaman yang doyong atau miring rata-rata 8,57 pokok/ha. Tanaman doyong biasanya ditemui pada tanah gambut. Hasil survei juga mendapatkan adanya tanaman yang tidak produktif sekitar 6,55 pokok/ha. Tanaman yang tidak produktif dalam perkebunan kelapa sawit petani swadaya dapat disebabkan petani swadaya menggunakan bibit tidak unggul dalam budidaya kelapa sawit. Tanaman tidak produktif dapat terjadi karena perbedaan tingkat kematangan antara bunga jantan dan bunga betina sehingga tidak terjadi pembuahan.

Jenis bibit yang digunakan petani kelapa sawit pada umumnya terdiri dari bibit mariat dan bibit mariles (mariat lesan). Petani responden yang menggunakan bibit mariat sebanyak 14 orang (42,2%), bibit mariles sebanyak 9 orang (54,6%), dan sebanyak 9 orang tidak mengetahui jenis dan asal bibit yang digunakan. Bibit yang dibeli petani

berasal dari orang-orang terdekat dan tempat penangkaran bibit yang tidak bersertifikat. Petani mengakui tidak mengetahui adanya perbedaan hasil buah sawit yang sangat signifikan antara penggunaan bibit tidak unggul dan bibit unggul. Dalam membeli bibit kelapa sawit, petani hanya mempertimbangkan harga bibit yang murah dan saran dari orang lain. Kondisi ini dapat dimengerti karena pada awal tahun 2000 pada saat petani swadaya mulai tertarik dengan tanaman kelapa sawit, teknologi budidaya tanaman kelapa sawit hanya dikuasai oleh pelaku perkebunan besar.

Petani kelapa sawit swadaya Desa Air Hitam melakukan pembersihan piringan rata-rata 2,91 kali dalam setahun. Pembersihan piringan dilakukan dengan teknik manual dengan menggunakan tenaga kerja sebesar 1,64 HOK. Upah pembersihan piringan dihitung berdasarkan jumlah pokok yang dapat dibersihkan. Rata-rata upah yang dibayarkan dalam pembersihan pokok sebesar Rp. 2.536,3/pohon. Rotasi pembersihan piringan tanaman kelapa sawit menghasilkan seharusnya dilakukan empat kali dalam setahun.

Pembersihan kapling terdiri dari dua kegiatan budidaya yaitu pembersihan gulma secara manual dan penyemprotan herbisida untuk mengendalikan gulma pada blok tanaman. Rata-rata petani kelapa sawit swadaya melakukan pembersihan kapling 2,67 kali dalam setahun. Rotasi pembersihan kapling yang dilakukan petani beragam. Pembersihan kapling dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga kerja rata-rata sebesar 1,7 HOK setiap pembersihan kapling. Upah yang dibayarkan setiap pembersihan kapling sebesar Rp.230.303/ha. Pengendalian gulma dilakukan dengan herbisida rata-rata sekali dalam setahun. Petani pada umumnya melakukan penyemprotan herbisida sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya upah untuk penyemprotan herbisida. Penggunaan

dosis herbisida petani kelapa sawit swadaya rata-rata adalah 3,71 liter/ha. Petani yang melakukan penyemprotan herbisida sekitar 81,82% dari petani. Jenis herbisida yang digunakan petani kelapa sawit adalah Gramoxon dan Round up.

Petani kelapa sawit swadaya Desa Air Hitam rata-rata belum melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu. Petani belum memperhatikan resiko penyakit dan hama tanaman yang akan menyerang perkebunan petani. Hal ini terlihat dari petani sampel yang rata-rata tidak menggunakan pestisida atau pengendalian hama terpadu dalam budidaya perkebunan kelapa sawit.

Pemangkasan merupakan kegiatan budidaya yang bertujuan untuk membuang daun tanaman untuk mendapatkan jumlah pelepah yang optimal dalam proses fotosintesis. Petani kelapa sawit melakukan pemangkasan pelepah atau *pruning* 2,09 kali dalam setahun. Petani swadaya tidak melakukan pemangkasan sendiri, pemangkasan dilakukan oleh orang lain dengan sistem borongan atau sistem harian. Rata-rata pelepah yang dapat dipangkas 1,73 HOK dalam sehari adalah sebesar 175 pelepah. Upah yang dibayarkan untuk pemangkasan pelepah sebesar Rp.572/pelepah atau bila menggunakan sistem borongan upah pemangkasan sebesar Rp.500.000/ha – Rp.600.000/ha. Rotasi pemangkasan pelepah yang dilakukan petani sudah sesuai dengan standar pemangkasan pelepah yaitu dua kali setahun tetapi teknis pemangkasan pelepah yang dilakukan masih jauh dari pelaksanaan GAP. Petani belum mengetahui jumlah maksimal dan minimal pelepah dalam setiap pohon, penghitungan pelepah dilakukan agar produksi yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit tetap optimum.

Petani kelapa sawit swadaya Desa Air Hitam pada umumnya menggunakan pupuk kimia berupa Urea, TSP, KCL, dan Kieserit. Petani melakukan pemupukan rata-rata 3,12 kali dalam setahun dengan

melibatkan 1,58 HOK. Tenaga kerja untuk pemupukan pada umumnya dilakukan oleh petani kelapa sawit tersebut. Dosis pupuk kimia yang digunakan petani rata-rata sebanyak 155,53 kg/tahun untuk pupuk urea, 116,13 kg/tahun untuk pupuk TSP, 147,71 kg/tahun untuk pupuk KCL, dan 144,94 kg/tahun untuk pupuk kieserit. Penggunaan pupuk petani swadaya masih belum sesuai dengan standar pupuk kebun. Penggunaan pupuk yang memenuhi standar perkebunan adalah penggunaan pupuk Urea dan Kieserit. Penggunaan pupuk KCL dan TSP lebih rendah dari standar dosis pupuk perkebunan.

Rotasi pemanenan TBS petani swadaya di Desa Air Hitam dilaksanakan tiga kali dalam satu bulan atau 10 hari sekali. Rata-rata rotasi pemanenan yang dilakukan petani adalah sebanyak 31,6 kali dalam setahun. Karakteristik yang dijadikan petani untuk melakukan pemanenan adalah adanya perubahan warna pada buah yang sudah matang dan jatuhnya 3-5 buah pada satu tandan. Hasil panen petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam di jual ke toke atau pedagang pengumpul setempat. Toke atau pedagang pengumpul langsung mendatangi petani kelapa sawit dan mengangkut hasil produksi kelapa sawit petani. Buah sawit biasanya dikumpulkan oleh pedagang pengumpul di suatu tempat pengumpulan. Apabila tercapai jumlah tertentu (misalnya satu truk) baru buah sawit diangkut ke pabrik. Hal ini kemungkinan dilakukan untuk efisiensi transportasi namun dapat terjadi buah sawit dikumpulkan lebih dari dua hari sehingga kualitasnya menurun. Petani kelapa sawit swadaya menggunakan tenaga kerja sebesar 1,85 HOK dalam melakukan pemanenan. Upah panen yang dibayarkan adalah Rp.133,64 per kg atau upah rata-rata Rp. 60.349,15 per panen per hektar.

Kebun kelapa sawit petani dalam sekali panen rata-rata mampu

menghasilkan 451,58 kg TBS/ha. Jumlah tandan rata-rata yang dihasilkan dalam satu kali panen adalah 31,82 tandan dengan berat rata-rata 14,03 kg/tandan. Rata-rata frekuensi panen petani adalah 31,64 kali dalam setahun, maka dapat diperoleh produksi TBS petani sebanyak 14.287,99 kg/ha/tahun atau sekitar 14,28 ton/ha/tahun. Produksi TBS yang dihasilkan oleh petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam dapat dikatakan kurang produktif. Berdasarkan PPKS (2005), kelapa sawit pada umur sembilan tahun merupakan usia produktif dengan jumlah tandan sebanyak 50 tandan dan berat 17 kg/tandan sehingga dapat mencapai produksi TBS optimal 31 ton/ha/tahun. Sementara petani kelapa sawit swadaya Desa Air Hitam hanya dapat mencapai 14,28 ton atau 46,06% dari hasil produksi potensial, maka dapat dikatakan bahwa produksi kelapa sawit petani swadaya belum optimal.

Harga yang diperoleh akan berpengaruh langsung pada pendapatan usahatani kelapa sawit. Harga jual TBS yang berlaku pada bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.255/kg. Petani belum memiliki akses untuk menjual hasil panen ke perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada umumnya petani swadaya tidak tergabung dalam kelompok tani. Petani swadaya hanya tergabung dalam KUD Desa Air Hitam Jaya, namun pada kenyataannya KUD Air Hitam Jaya belum beroperasi secara aktif dan tidak memiliki akses ke pabrik kelapa sawit.

### **Analisis Usahatani Kelapa Sawit**

Biaya usahatani terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya faktor. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan petani kelapa sawit dalam kegiatan budidaya yang tidak tergantung terhadap volume produksi. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan petani dalam budidaya yang besarnya tergantung pada volume produksi. Sementara biaya faktor merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usahatani dalam bentuk bunga, sewa, dan pajak. Biaya

tetap dalam budidaya kelapa sawit petani swadaya Desa Air Hitam terdiri dari biaya penyusutan alat, biaya pengadaan pupuk dan pemupukan, biaya pembersihan piringan, biaya pembersihan kapling, dan biaya pemangkasan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya merupakan bagian dari biaya tetap namun petani belum menerapkannya. Biaya variabel dalam budidaya kelapa sawit petani swadaya hanyalah biaya pemanenan. Secara rinci biaya usahatani dapat dilihat pada Tabel 1. Kegiatan usahatani kelapa sawit rakyat belum terdapat biaya faktor. Petani umumnya memanfaatkan dana sendiri dan tidak melakukan peminjaman untuk kegiatan usahatannya sehingga tidak terdapat biaya bunga. Petani juga hanya menggunakan asetnya sendiri seperti lahan, bangunan dan peralatan sehingga tidak terdapat biaya sewa. Demikian pula, petani pada umumnya belum dikenakan pajak (PPn dan PPh).

Penerimaan usahatani atau pendapatan kotor diperoleh dari volume produksi usahatani kelapa sawit dikalikan dengan harga buah sawit. Produksi kelapa sawit yang dihasilkan petani per tahun adalah sebanyak 14.286,21 kg dan rata-rata harga yang berlaku sebesar Rp. 1.255/kg. Pendapatan kotor usahatani kelapa sawit petani swadaya di Desa Air Hitam diperoleh sebesar Rp. 17.929.199,67/ha/tahun.

Pendapatan bersih usahatani merupakan keuntungan yang diperoleh dari pengurangan total biaya dari pendapatan kotor. Pendapatan bersih petani kelapa sawit diperoleh sebesar Rp.11.662.501,10/ha/tahun atau Rp.971.875,09/ha/bulan. Luas lahan kelapa sawit petani rata-rata 2.57 hektar, dengan demikian pendapatan usahatani kelapa sawit rata-rata adalah Rp.2.473.158,60. Pendapatan bersih usahatani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam berada di atas UMR tahun 2014 sebesar Rp.1.700.000/bulan (Depnakertrans, 2014).

Tabel 1 Analisis usaha perkebunan kelapa sawit petani swadaya di Desa Air Hitam Tahun 2013 (dalam satuan hektar)

No.	Keterangan	Volume	Satuan	Frekuensi	Biaya satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Biaya Tetap (BT)</b>						<b>4.357.540,76</b>
2	Penyusutan (depresiasi) alat	1	Paket			<b>152.793,94</b>
3	Pengadaan Pupuk	11,88				<b>1.373.243,95</b>
	a. ZA/Urea	3,11	Zak/ha/th		140.454,55	436.890,25
	b. TSP/SP36	2,32	Zak/ha/th		115.000,00	267.106,67
	c. MOP/KCL	2,95	Zak/ha/th		119.393,94	352.711,40
	d. Kiserit/Dolomit	2,90	Zak/ha/th		95.606,06	277.141,69
4	Pengadaan Herbisida	3,71	Liter		60.000,00	<b>222.727,27</b>
6	Pengadaan Pesticida	-			-	0,00
7	Kegiatan Perawatan					<b>2.670.189,99</b>
	a. Pembersihan Piringan	1	Hektar	2,91	327.190,91	951.828,10
	b. Pembersihan Kapling	1	Hektar	2,67	230.303,03	230.303,03
	c Pembersihan Pelepah	1	Hektar	2,09	500.000,00	1.045.454,55
	c. Pemupukan	11,88	Zak	3,12	11.939,39	442.604,32
<b>II. Biaya Variabel (BV)</b>						<b>1.909.157,81</b>
1	Biaya Panen					<b>1.909.157,81</b>
	a. Upah panen	14.286,21	kg		133,64	1.909.157,81
<b>III. Biaya Total (BT+BV)</b>						<b>6.266.698,57</b>
<b>IV. Pendapatan Kotor</b>						
1	Penjualan TBS	14.286,21	Kg		1.255	<b>17.929.199,67</b>
<b>V. Pendapatan Bersih (IV-III-V)</b>						<b>11.662.501,10</b>
<b>VI. Pendapatan Bersih per Ha per Bulan (V/12)</b>						<b>971.875,09</b>
<b>VII. Pendapatan Bersih pe 2,57 Ha per Bulan (VI x 2,57)</b>						<b>2.473.158,60</b>

Pendapatan rumah tangga petani dapat diperoleh dari penjumlahan pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian (pendapatan perkebunan kelapa sawit dan pendapatan non-kelapa sawit) dan pendapatan rumah tangga non-usaha pertanian. Pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam sebesar Rp 38.714.266,82/tahun sehingga rata-rata total pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit swadaya per bulan sebesar Rp. 3.226.188,90. Dari total pendapatan rumah tangga petani tersebut

sekitar 76,66% merupakan pendapatan dari usahatani kelapa sawit, 14,32% pendapatan dari usahatani non-kelapa sawit dan 9,02% merupakan pendapatan dari kegiatan non-pertanian. Pendapatan usahatani kelapa sawit merupakan pendapatan utama rumah tangga petani.

#### **Penerapan P & C**

ISPO merupakan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan bersifat lestari yang wajib dilaksanakan bagi seluruh perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Standar ISPO untuk perkebunan kelapa sawit swadaya terdiri dari 4 prinsip dan 20 kriteria, setiap kriteria dilengkapi dengan indikator dan panduan pelaksanaan kriteria ISPO. Total penerapan seluruh Prinsip dan Kriteria ISPO yang dilakukan oleh petani kelapa sawit pola swadaya calon sertifikasi di Desa Air Hitam yaitu sebesar 43,5%, dengan nilai aktual 1.437. Penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO masih jauh dari nilai yang seharusnya yaitu 3300. Kategori penerapan prinsip dan kriteria yang dilakukan petani adalah “kurang baik”, yang berada pada kisaran nilai interval 1188 - 1715,99.

### **Prospek Petani Kelapa Sawit dalam Sertifikasi ISPO**

Sertifikasi ISPO berbasis pada 3P (*planet, profit and people*) dalam pelaksanaan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit Indonesia diharapkan tidak hanya menekankan pada keuntungan finansial semata tetapi juga memberikan perhatian bagi keadaan lingkungan perkebunan dan memberikan keadaan yang nyaman bagi masyarakat. Pelaksanaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi keharusan bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia, karena perkebunan kelapa sawit Indonesia memberikan kontribusi perekonomian Indonesia dan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia.

Sertifikasi ISPO berisi Prinsip dan Kriteria dalam panduan pelaksanaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sertifikasi ISPO untuk petani swadaya terdiri dari 4 Prinsip dan 20 Kriteria yang memberikan manfaat bagi petani. Manfaat yang dapat diterima petani seperti bergabungnya petani dalam sebuah wadah yang dapat menaungi segala kegiatan budidaya petani dan terdapat perusahaan kelapa sawit yang bersedia sebagai penampung TBS petani.

Segi *profit*, sertifikasi ISPO memberikan kemudahan dalam akses pasar, akses finansial dan akses input. Petani kelapa sawit yang ingin mengikuti

sertifikasi ISPO harus memiliki kelompok tani dan tergabung dalam koperasi. Koperasi atau kelompok tani dibentuk sebagai wadah untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggota. Koperasi petani dan kelompok tani harus memenuhi standar ISPO. Koperasi dan kelompok tani harus memiliki dokumen pelaksanaan kegiatan koperasi atau kelompok tani, dokumen rencana kegiatan koperasi atau kelompok tani dan melakukan evaluasi kegiatan koperasi dan kelompok tani secara berkala.

Melalui koperasi atau kelompok tani, petani diarahkan untuk melakukan kegiatan budidaya secara tepat, petani juga akan diarahkan peduli terhadap lingkungan, petani diarahkan cara menghadapi permasalahan sengketa lahan dan penyelesaian sengketa lahan. Koperasi sebagai wadah petani juga dapat menyediakan akses input dan akses finansial yang dapat membantu kegiatan usahatani anggota.

Petani yang telah tergabung dalam koperasi atau kelompok tani sertifikasi ISPO memiliki akses pasar yang lebih luas dan mendapatkan informasi harga buah sawit secara transparan. Hasil TBS petani yang sesuai dengan standar perkebunan kelapa sawit akan lebih diterima perusahaan dibandingkan hasil TBS perkebunan yang tidak memiliki sertifikasi ISPO. Koperasi atau kelompok tani yang tergabung dalam sertifikasi ISPO biasanya dilibatkan dalam proses penetapan harga TBS. Petani dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung harga TBS tinggi dan faktor-faktor yang menyebabkan harga TBS cenderung rendah.

Apabila pelaksanaan sertifikasi ISPO mampu dilaksanakan oleh petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam, akan terjadi peningkatan pertumbuhan dan usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diikuti dengan peningkatan kemajuan desa.

Pelaksanaan sertifikasi ISPO dari segi *planet* (lingkungan), dapat menepis isu negatif lingkungan mengenai kelapa sawit Indonesia dan menjaga kelestarian lingkungan. Sertifikasi ISPO mengarahkan petani kelapa sawit untuk melakukan kegiatan budidaya yang memperhatikan keberlanjutan perkebunan petani dan lingkungan sekitar perkebunan. Teknik budidaya yang dilakukan harus sesuai dengan jenis lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dan mencegah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Petani kelapa sawit harus mengetahui dan menjaga keberadaan flora dan fauna langka yang terdapat disekitar perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan sertifikasi dari segi *people* (sosial), dapat mengurangi terjadinya sengketa. Petani yang tergabung dalam sertifikasi ISPO tidak boleh mengalami sengketa lahan dan bila terjadi sengketa lahan wajib menyelesaikan sengketa lahan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sengketa lahan dapat berupa konflik tanah, adanya tumpang tindih dengan usaha perkebunan lain atau pembukaan perkebunan di lahan milik negara.

Berdasarkan hasil analisis keragaan usahatani dan penerapan praktek-praktek setara standar ISPO, masih banyak hal yang harus dikerjakan dan dilengkapi oleh petani swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Petani perlu membentuk kelompok tani, mengaktifkan koperasi, dan meningkatkan praktek-praktek budidaya yang baik. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai standar ISPO memerlukan biaya-biaya tambahan yang mungkin akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh dalam jangka pendek. Prospek petani kelapa sawit swadaya dalam menghadapi sertifikasi ISPO adalah sangat memungkinkan apabila petani mampu melaksanakan perbaikan-perbaikan tersebut dan memahami segala resiko yang harus dihadapinya.

## **Tantangan dalam Menghadapi Sertifikasi ISPO**

Keragaan usahatani yang dilakukan menunjukkan kinerja usahatani petani kelapa sawit swadaya saat ini. Keragaan usahatani dan praktek-praktek budidaya serta pengelolaan usahatani yang dilakukan petani dibandingkan dengan standar ISPO (4 prinsip dan 20 kriteria) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit petani swadaya masih tergolong rendah.

Perkebunan kelapa sawit petani swadaya belum sesuai dengan standar ISPO. Perkebunan kelapa sawit rakyat tergolong dalam kriteria “kurang baik” dengan rata-rata skor 1.437 dari nilai maksimal 3.300. Perkebunan kelapa sawit petani swadaya hanya mampu memenuhi 43,5% dari seluruh penerapan sertifikasi ISPO

Keadaan umum petani menunjukkan tingkat pendidikan petani sebagai salah satu tantangan dalam menghadapi sertifikasi ISPO. Petani pada umumnya merupakan lulusan SD dan tidak pernah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan formal petani yang rendah mempengaruhi kemampuan intelektual petani untuk memahami, menerima dan mengadopsi sertifikasi ISPO. Tingkat pendidikan formal yang rendah merupakan kendala yang dapat di atasi dengan memberikan pendidikan non-formal bagi petani. Pendidikan non formal dapat diberikan dengan frekuensi yang lebih sering mengingat tingkat pendidikan petani yang rendah sulit untuk cepat menerima informasi

Keragaan usahatani yang diukur menggunakan standar ISPO terdapat beberapa prinsip dan kriteria yang memiliki skor rendah. Nilai skor yang rendah pada penerapan prinsip dan kriteria ISPO merupakan indikator yang menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO tersebut. Penerapan prinsip dan kriteria ISPO yang rendah merupakan salah satu

tantangan dan permasalahan yang dihadapi petani dalam sertifikasi ISPO.

Penerapan Prinsip 2 Bagian Pertama sertifikasi ISPO tergolong dalam kriteria “kurang baik”. Prinsip 2 Bagian Pertama membahas mengenai organisasi kelembagaan perkebunan petani. Tantangan dalam mengikuti sertifikasi ISPO yang terdapat pada Prinsip 2 Bagian Pertama adalah petani tidak memiliki kelompok tani atau koperasi aktif sebagai wadah atau mitra kegiatan usahatani.

Pada penerapan Prinsip 2 Bagian Kedua sertifikasi ISPO tergolong dalam kriteria “kurang baik”. Prinsip 2 Bagian Kedua membahas mengenai penerapan teknis budidaya dan pengangkutan perkebunan. Tantangan dalam mengikuti sertifikasi ISPO yang terdapat pada Prinsip 2 Bagian Kedua adalah petani tidak dapat menerapkan kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar perkebunan maupun standar ISPO. Penerapan budidaya yang tidak sesuai dengan standar perkebunan antara lain pemeliharaan sumber air sekitar perkebunan, penggunaan benih tidak unggul, pelaksanaan penanaman pada lahan gambut dan lahan mineral, aplikasi pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penjualan serta penentuan kesepakatan harga.

Penerapan Prinsip 3 mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tergolong dalam kriteria “tidak baik”. Tantangan dalam mengikuti sertifikasi ISPO pada Prinsip 3 adalah petani tidak memiliki UKL-UPL atau SPPL mengenai kewajiban izin lingkungan. Petani pada umumnya tidak dapat menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati yang berada di sekitar lingkungan perkebunan kelapa sawit.

Pada Prinsip 4 yang membahas mengenai peningkatan usaha berkelanjutan penerapan petani kelapa sawit swadaya tergolong “tidak baik”. Tantangan dalam mengikuti sertifikasi

ISPO Prinsip 4 adalah petani belum memiliki koperasi atau kelompok tani. Kelompok tani atau koperasi yang diharapkan dalam standar ISPO adalah kelompok tani atau koperasi yang memiliki struktur kepengurusan secara jelas, dokumen pelaksanaan kegiatan, dokumen perencanaan kegiatan dan melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

Tantangan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit swadaya dalam menghadapi sertifikasi ISPO sangat berkaitan dengan akses informasi, akses input, akses finansial, dan akses pasar. Tantangan yang dihadapi petani kelapa sawit swadaya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh petani. Dukungan dan kerjasama kemitraan dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan guna melancarkan usaha para petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keragaan kebun petani swadaya Desa Air Hitam tergolong dalam keadaan kurang baik. Praktek budidaya kebun petani swadaya belum sesuai dengan standar perkebunan kelapa sawit. Keragaan kebun yang belum sesuai standar budidaya kelapa sawit adalah pembersihan piringan, pembersihan kapling, pemangkasan pelepah, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit tanaman.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit petani swadaya belum menerapkan standar Prinsip dan Kriteria ISPO. Tingkat penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO pada petani swadaya ISPO berada pada kriteria “kurang baik” dengan total skor 1437 atau 43,5%.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan akan memberikan berbagai manfaat bagi perkebunan kelapa sawit swadaya, lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Manfaat dapat diterima apabila petani mengikuti

sertifikasi ISPO adalah terbukanya akses pasar dan akses finansial bagi petani, peningkatan usaha berkelanjutan bagi masyarakat, berkurangnya sengketa lahan dan isu negatif perkebunan kelapa sawit Indonesia. Namun prospek petani dalam menghadapi sertifikasi ISPO sangat tergantung dari kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas petani, kelompok tani, dan koperasi. Tantangan bagi petani swadaya Desa Air Hitam dalam menghadapi sertifikasi ISPO berupa rendahnya tingkat pendidikan petani untuk menerima adopsi sertifikasi ISPO. Tantangan bagi petani swadaya dalam menghadapi ISPO terlihat pada penerapan kriteria ISPO yang tergolong tidak baik. Petani kelapa sawit swadaya belum memiliki kelompok tani atau koperasi, petani juga harus memenuhi kelengkapan izin lingkungan seperti SPPL atau UKL-UPL, Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) sesuai standar ISPO dan penerapan budidaya petani belum mampu memenuhi standar ISPO.

### **Saran**

Untuk mendapatkan sertifikat ISPO petani kelapa sawit pola swadaya disarankan untuk meningkatkan kapasitas petani, kelompok tani dan koperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.

Semua pihak yang berperan dalam sertifikasi kelapa sawit diharapkan dapat membantu dan membina petani dalam sosialisasi dan pemahaman sertifikasi ISPO. Sosialisasi dan pemahaman dapat berupa penyuluhan tentang ISPO dan pelatihan praktek-praktek budidaya terbaik untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki petani kelapa sawit.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badrun, M. (2010). Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian RI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Direktorat Jendral Perkebunan.
- Finger, R. and J. H. M. Peerlings (2012). Economics of Agribusiness. Wageningen, Agricultural Policy Group, Wageningen University.
- Manggabarani, A. (2009). Memaknai Sebuah Anugrah Sumbangsih Kelapa Sawit bagi Indonesia. Jakarta, Ideals Agro Akbar.
- PPKS (2005). Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan (Seri Buku Saku 18). Medan, PPKS.
- Shadbolt, N. and S. Martin (2005). Farm Management in New Zealand. Oxford University Press, Australia.
- Soekartawi (1995). Analisis Usaha Tani. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Widodo, S. T. (1990). Indicator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.